

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

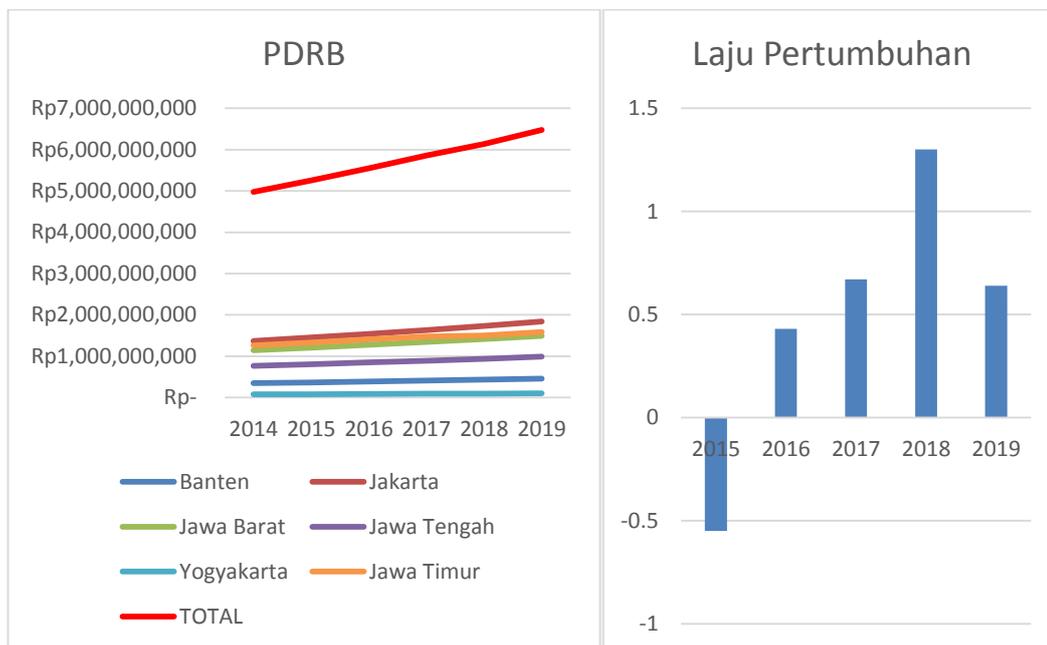
Pembangunan ekonomi wilayah ialah sebuah awalan bagi kegiatan pembangunan, agar daerah dapat mengetahui lebih dalam kemampuan serta hal yang dijadikan kebutuhan daerahnya. Pengembangan potensi masing-masing daerah atau otonomi daerah di Indonesia diatur dan dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang intinya bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan (Delingga & Marwa, 2016). Era otonomi daerah, tiap-tiap pemerintah daerah diberikan kewenangan atas kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing, adapun kebijakan untuk mencapai kemandirian daerah salah satunya meningkatkan sumber pendapatan keuangan daerah melalui, pajak daerah, retribusi daerah, investasi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada level daerah ini yaitu pemberian layanan yang lebih efisien, cepat dan efektif (Dewi & Sri Budhi, 2018).

Penerapan otonomi daerah ini diasumsikan sebagai peran pemerintah daerah mempunyai pengetahuan mendalam akan kebutuhan serta pendapat dari masyarakatnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukannya sumber pengeluaran pembangunan daerah yang perlu untuk diberi konsentrasi mendalam adalah pendapatan daerah ini sendiri, adapun sumber keuangan tersebut menjadi suatu bentuk kontribusi langsung masyarakat daerah bagi proses pembangunan. Pendapatan daerah yang menjadi bentuk partisipasi masyarakat ini termasuk didalamnya yaitu pembayaran pajak, retribusi dan investasi yang nanti diakhir dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Fadli, 2017).

Pulau Jawa merupakan pulau yang terdiri dari enam provinsi yang secara nasional memiliki perkembangan ekonomi yang menghasilkan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun belum dapat mengatasi sepenuhnya permasalahan kesenjangan penerimaan keuangan antar daerahnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak serta merta menjadikan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa bergerak cepat. Hal ini diduga disebabkan karena adanya kesenjangan penerimaan keuangan daerahnya yang kurang signifikan dan terdapat ketimpangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Rostow dan Musgrave yaitu adanya korelasi antara perkembangan pembiayaan pemerintah terhadap tahap perekonomian yang terbagi atas tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut, dimana tahap awal terdapat gabungan persenan antara investasi pemerintah dan investasi swasta hingga sampai di tahap lanjut yang dimana investasi swasta semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian, selain itu dijelaskan juga oleh Peacock Wiseman yang dimana pemerintah berusaha meningkatkan pengeluarannya dengan memperbesar penerimaannya guna meningkatkan perekonomian wilayah.

Tolak ukur ketercapaian ekonomi daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara riil di tiap tahunnya, dapat diukur dengan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Pulau Jawa berkontribusi paling besar dalam membentuk Produk Domestik Bruto Nasional. Banyaknya potensi penerimaan pendapatan fiskal dan investasi yang ada di Pulau Jawa menjadi peluang yang cukup besar bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Struktur perekonomian di Indonesia didominasi oleh kontribusi PDRB dari Pulau Jawa sebesar lebih dari 50% (Rahma, 2018). Pertumbuhan perekonomian nasional hanya berpusat di Pulau Jawa karena struktur perekonomian Pulau Jawa sudah ditopang oleh kinerja pertanian serta perindustrian (Nordiansyah, 2018). Terlampir dibawah ini gambar Perkembangan dan Laju PDRB atas Dasar Harga Konstan Pulau Jawa pada tahun 2014-2019.

Gambar 1. Perkembangan dan Laju PDRB Pulau Jawa pada tahun 2014-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

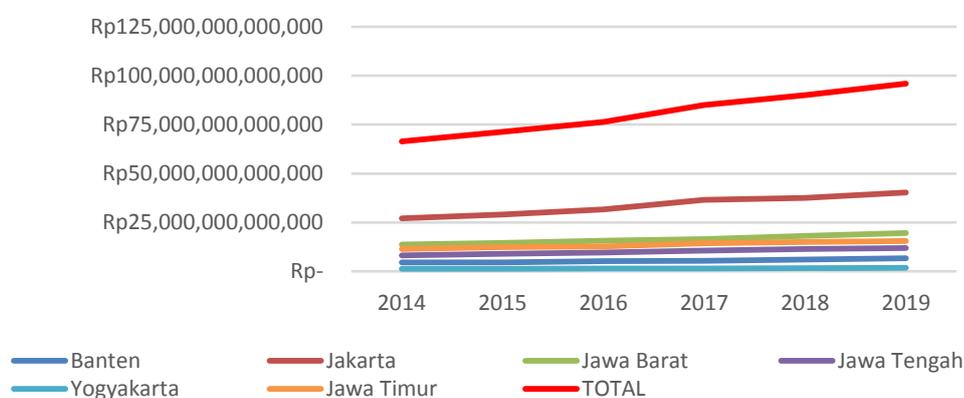
Terlihat dari gambar 1. Perkembangan PDRBADHK Pulau Jawa terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya namun tidak signifikan dan cenderung laju pertumbuhan perekonomiannya lambat. Seperti pada Provinsi Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang mengalami pergerakan pertumbuhan perekonomian yang sangat lambat. Lain halnya dengan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta yang memiliki pergerakan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dari provinsi lainnya walaupun pergerakannya tidak signifikan meningkat, hal ini disebabkan Jakarta Jawa Barat dan Jawa Timur didukung oleh banyaknya sektor industri dan infrastruktur yang memadai. Adapun laju pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0.55% namun PDRBnya meningkat, begitu pun laju pertumbuhan perekonomian di tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar -0.64% namun PDRBnya tetap meningkat.

Rosen dan Gayer mengemukakan tentang keuangan publik yang merupakan penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan masyarakat. Definisi tersebut menjadikan istilah keuangan publik tercermin dari aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah lainnya yang besarnya akan

berpengaruh ke dalam perekonomian. Penerimaan pajak merupakan komponen penting dan memiliki sumbangsih terbesar dalam penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah yang meningkat ini yang akhirnya akan diperlukan bagi kesejahteraan rakyat dengan pembangunan sarana dan prasarana guna mempercepat laju pertumbuhan perekonomian (Haryanto & Priyo, 2020).

Pajak ialah sumbangan masyarakat pada pembendaharaan negara atas dasar perbuatan dengan tidak memperoleh pengembalian langsung dan diperlukan bagi pembayaran pengeluaran umum. Pemerintah pusat menjelaskan untuk menambahkan nilai aset terdiri atas pendapatan domestik yang dihasilkan dari pajak dan non pajak dan subsidi dari pemerintah lainnya (Juliannisa, 2018). Capaian penerimaan pajak di Pulau Jawa merupakan kontribusi pajak terbesar secara nasional. Presentase penerimaan pajak di Pulau Jawa ini menunjukkan kegiatan ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa menjadikan taraf pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa meningkat (Chandra, 2016). Berikut terlampir gambar 2 mengenai Penerimaan Pajak Daerah Pulau Jawa pada tahun 2014-2019.

Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pulau Jawa Pada Tahun 2014-2019



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021

Terlihat dari sajian gambar 2. Realisasi penerimaan pajak Pulau Jawa meningkat di setiap tahunnya namun memiliki pergerakan yang cukup lambat dilihat dari garis grafik yang cenderung datar. Pajak daerah merupakan penyokong utama penerimaan pendapatan daerah yang berkontribusi besar akan kegiatan pemerintahan. Akibat dari lambatnya pergerakan penerimaan pajak daerah ini diduga menjadi salah satu penyebab melambatnya pergerakan laju perekonomian

Laras Maodi, 2021

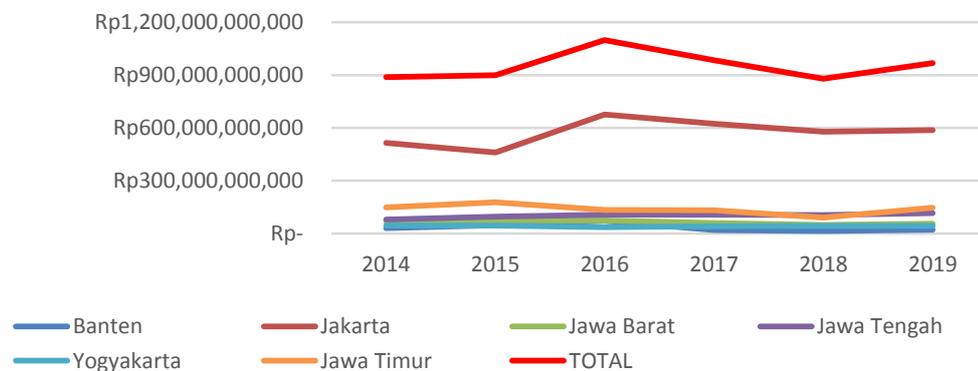
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN PULAU JAWA TAHUN 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

daerah di Pulau Jawa. Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2015 dikarenakan Pulau Jawa menjadi penyumbang pajak daerah yang mencapai 81% dari total seluruh penerimaan di Indonesia dan banyak perusahaan yang beroperasi di Pulau Kalimantan namun kantor pusatnya terletak di Pulau Jawa (Hanifah, 2016). Pada tahun 2016, peningkatan penerimaan pajak Pulau Jawa sebesar 78% dari total penerimaan pajak Indonesia dikarenakan adanya peningkatan jumlah populasi yang membuat tingkat konsumsi juga meningkat. Peningkatan penerimaan pajak tertinggi di Pulau Jawa yaitu pada tahun 2017. Peningkatan penerimaan pajak pada tahun ini dikarenakan adanya kenaikan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia sebesar lebih dari 90% dari total penerimaan yang ditargetkan. Untuk di Pulau Jawa sendiri memiliki kontribusi terbesar dalam peningkatan ini yaitu beberapa KPP meningkat sebesar 70% hingga 90% (Putera, 2017). Pada tahun 2018 juga masih mengalami peningkatan dikarenakan adanya dobrakan dari penerimaan pajak Provinsi Banten yang melampaui target hingga 101,52%. Pada tahun 2019, peningkatan penerimaan pajak Pulau Jawa dikarenakan adanya total penerimaan pajak yang melampaui target di Provinsi Jawa Timur sebesar 104,27%.

Selain pajak, retribusi daerah juga berpengaruh terhadap kemandirian daerah serta berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktor yang harus diberikan konsentrasi dalam pembiayaan pembangunan yang akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian adalah penerimaan daerah yang dimana retribusi masuk di dalamnya. Retribusi inilah yang menjadi bentuk kontribusi langsung rakyat daerah untuk mendukung proses perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Berikut terlampir gambar 3. Penerimaan Retribusi Pulau Jawa pada tahun 2014-2019.

Gambar 3. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pulau Jawa Pada Tahun 2014-2019



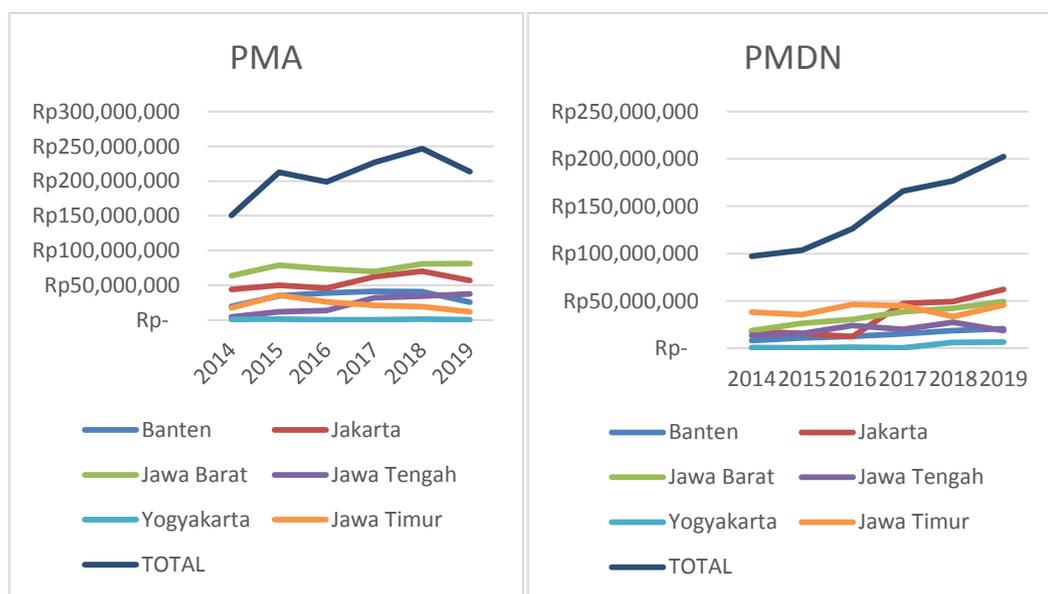
Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021

Terlihat dari sajian gambar 3. Realisasi penerimaan retribusi Pulau Jawa terus mengalami fluktuasi di setiap tahunnya dan memiliki pergerakannya yang kurang signifikan. Hal ini diduga pula menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan laju pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa menjadi kurang signifikan meningkat atau cenderung menurun. Peningkatan penerimaan retribusi terbesar yaitu pada tahun 2016 dikarenakan adanya penerimaan retribusi yang melampaui target oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 105,17%, sedangkan untuk penurunan penerimaan retribusi terbesar yaitu pada tahun 2017. Secara umum salah satu faktor penurunan penerimaan retribusi Pulau Jawa yaitu adanya penurunan jumlah pengunjung wisata yang ada di Pulau Jawa dikarenakan adanya dugaan faktor eksternal seperti adanya perbaikan infrastruktur yang sedang berlangsung,serta kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi yang masih perlu perhatian (Nuradi, 2019).

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan banyak investor yang memperluas jaringan pemasarannya. Pemerintah harus dapat mengalokasikan modal yang tersedia secara tepat dan bijak untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan tahap awalan bagi kegiatan proses produksi juga salah satu indikator bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, dari itu dapat disimpulkan bahwa investasi juga menjadi langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi (Sari dkk., 2016).

Realisasi investasi nasional saat ini didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Peningkatan realisasi investasi juga didorong oleh tekad pemerintah yang akan melanjutkan pergerakan dalam bidang ekonomi serta melakukan pengawalan ketat investasi oleh berbagai instansi pemerintah (Wicaksono, 2019). Berikut terlampir gambar 4. Penerimaan Penyertaan Modal Asing (PMA) dan Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) Pulau Jawa tahun 2014-2019.

Gambar 4. Realisasi Penerimaan PMA dan PMDN Pulau Jawa Tahun 2014-2019



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020

Dari gambar 4 terlihat bahwa, realisasi penyertaan modal asing daerah Pulau Jawa mengalami fluktuasi di setiap tahunnya dan memiliki pergerakan yang masih terbilang lambat hampir di tiap tahun dan tiap provinsi di Pulau Jawa, akibat pergerakan investasi yang cukup lambat ini berdampak pada dugaan bahwa adanya penurunan laju pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa ini. Disamping PMA, PMDN yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa ini memiliki pergerakan yang terus mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak menjadikan pergerakan perekonomian Pulau Jawa menjadi cepat meningkat. Peningkatan investasi baik asing maupun dalam negeri pada tahun 2015 disebabkan adanya sektor usaha yang mendominasi yaitu listrik, gas dan air, industri kimia, transportasi, gudang dsb. Pada tahun 2016, PMA mengalami

penurunan karena adanya penurunan daya tarik investor luar terhadap Pulau Jawa, sedangkan PMDN terus meningkat karena adanya semangat para investor yang sebelumnya pudar di tahun 2015. Pada tahun 2017, PMA dan PMDN sama-sama mengalami peningkatan yang disebabkan oleh terlampauinya target penerimaan investasi dan pusatnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada tahun 2018, PMA masih mengalami peningkatan, lain halnya dengan PMDN yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan PMDN di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019, PMA Pulau Jawa kembali menurun karena investor asing mulai berminat untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Berbeda dengan PMDN Pulau Jawa yang mengalami peningkatan. Peningkatan investasi di Pulau Jawa secara umum disebabkan oleh faktor Pulau Jawa sebagai destinasi favorit untuk menjadi tujuan investasi (Gerintya, 2017).

Penelitian ini sepemikiran dengan hasil yang telah diteliti sebelumnya oleh Sufardi pada tahun 2019 dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai Ditinjau dari Faktor Pajak dan Retribusi Daerah dan memiliki hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah signifikan. Selain itu ada gap yang terlihat dari penelitian sebelumnya oleh Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko dan Jacline Sumual pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014) yang memiliki hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak signifikan. Adapun gap penelitian lainnya yang dilakukan oleh Renea Shinta Aminda dan Rachmatulaily Tinakartika Rinda pada tahun 2019 dengan judul Analisis Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Tahun 2010-2018), memiliki hasil PMA dan PMDN tidak signifikan.

Dapat ditarik simpulan bahwa pertumbuhan perekonomian Pulau Jawa terus mengalami peningkatan namun pergerakan dari perekonomian tersebut masih terbilang lambat dan kurang signifikan, adanya pergerakan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Penanaman Modal Asing (PMA) yang terbilang lambat diduga menjadi faktor perlambatan pergerakan pertumbuhan perekonomian di

Pulau Jawa serta Penanaman Modal Dalam Negeri yang memiliki pergerakan yang cukup signifikan namun diduga tidak menjadikan percepatan pergerakan pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh pajak daerah, retribusi daerah serta investasi baik PMA maupun PMDN yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukannya penelitian mendalam yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan penambahan literatur penelitian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan Perekonomian Pulau Jawa Tahun 2014-2019”.

I.2 Rumusan Masalah

Pulau Jawa memiliki potensi keuangan daerah yang besar yang dapat digali dan merubah tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dilihat dari kurun waktu enam tahun terakhir yaitu periode 2014-2019 besaran potensi keuangan daerah yang terealisasi di Pulau Jawa tidak serta merta menjadikan sebuah percepatan pergerakan laju perekonomiannya. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari faktor bagi pertumbuhan perekonomian di antaranya yaitu pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari penerimaan pemerintah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang mana pergerakan pendapatan kedua sektor tersebut masih belum signifikan serta investasi PMA yang juga memiliki pergerakan yang cukup lambat juga investasi PMDN yang pergerakannya cukup signifikan tetapi tidak menjadikan pergerakan laju pertumbuhan perekonomian bergerak cepat.

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa?
- b. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa?

- c. Bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa?
- d. Bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ilmu di sektor pertumbuhan ekonomi khususnya permasalahan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan faktor-faktor tertentu.

b. Manfaat Praktis

1) Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk saran bagi pemerintah daerah tiap provinsi di Pulau Jawa dalam perumusan kebijakan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Bagi Penulis

Untuk mendeskripsikan pengaruh ekspor migas, cadangan devisa, dan inflasi terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.